



**Safer
Internet
Lab**
Lead by CSIS
in partnership
with Google



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES

Google

Survei Nasional Opini Publik Peta Mis/Disinformasi di Indonesia: Tingkat Kepercayaan dan Dampaknya pada Demokrasi

Arya Fernandes, Beltsazar Krisetya, Ega Kurnia Yazid
CSIS/Safer Internet Lab



@saferinetlab



Safer Internet Lab



saferinternetlab.org

Latar belakang

- Survei opini publik ini dilakukan untuk memotret **penyebaran gangguan informasi** di Indonesia setelah pelaksanaan pemilihan umum 2024 serta **menganalisis dampaknya terhadap nilai-nilai demokrasi dan pemilu**.
- Dengan lanskap pemilu yang kompetitif, meningkatnya akses masyarakat terhadap internet dan sosial media, dan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, [survei pasca-pemilu menjadi penting](#) untuk melihat peta terkini gangguan informasi dan seberapa rentan masyarakat.
- Dalam survei ini kami menggunakan istilah **“gangguan informasi”** untuk menggambarkan **misinformasi** (informasi yang tidak akurat atau salah yang disebarkan **tanpa niat** untuk menyesatkan) dan **disinformasi** (informasi salah atau tidak akurat yang sengaja dibuat dan disebarkan dengan **tujuan untuk mengelabui atau memanipulasi**).



Aspek yang diukur dalam survei ini?

Survei ini mengukur beberapa hal terkait gangguan informasi di antaranya:

- Bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap gangguan informasi baik sebelum dan setelah pelaksanaan pemilu?
- Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepercayaan seseorang pada gangguan informasi?
- Seberapa besar kepercayaan seseorang terhadap gangguan informasi mempengaruhi kepuasan dan dukungan pada demokrasi serta kepercayaan pada integritas pemilu?
- Apakah terdapat hubungan/pengaruh antara kepercayaan gangguan informasi dan sikap publik terhadap peran negara?
- Seberapa tinggi atau rendah penggunaan AI Generatif dalam kampanye pemilu presiden?



Metodologi

Populasi	Populasi survei adalah penduduk Indonesia yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Populasi sasaran adalah penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah saat survei dilakukan.
Penarikan Sampel	Penarikan sampel sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan metode multistage random sampling . Penarikan sampel mempertimbangkan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk pada setiap provinsi, proporsi perempuan dan laki-laki dan kategori daerah perkotaan dan pedesaan.
Jumlah Sampel dan Margin of Error (MoE)	Jumlah sampel sebesar 1.200 responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Menggunakan 1.200 sample, <i>margin of error</i> survei ini sebesar +/- 2,8% , pada tingkat kepercayaan 95% .
Wawancara	Proses wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh enumerator.
Kendali Mutu	Kendali mutu dilakukan secara berlapis mulai dari proses rekrutmen, pelaksanaan training enumerator, kontrol pengumpulan data, spotcheck lapangan, hingga validasi dan verifikasi pasca pengumpulan data (<i>call-back</i>).
Periode Survei	31 Oktober – 7 November 2024
Keanggotaan Profesi	Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI)



Validasi Sampel dan Populasi: Provinsi

Kode	Nama Provinsi	Populasi (Sensus BPS 2020)	Sampel (2024)	Kode	Nama Provinsi	Populasi (Sensus BPS 2020)	Sampel (2024)
1	ACEH	2,0	1,7	18	NUSA TENGGARA BARAT	2,0	1,7
2	SUMATERA UTARA	5,5	5,4	19	NUSA TENGGARA TIMUR	2,0	1,7
3	SUMATERA BARAT	2,0	2,1	20	KALIMANTAN BARAT	2,0	2,1
4	RIAU	2,4	2,5	21	KALIMANTAN TENGAH	1,0	0,8
5	JAMBI	1,3	1,3	22	KALIMANTAN SELATAN	1,5	1,7
6	SUMATERA SELATAN	3,1	3,3	23	KALIMANTAN TIMUR	1,4	1,3
7	BENGGKULU	0,7	0,8	24	KALIMANTAN UTARA	0,3	0,4
8	LAMPUNG	3,3	3,3	25	SULAWESI UTARA	1,0	0,8
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0,5	0,8	26	SULAWESI TENGAH	1,1	0,8
10	KEP. RIAU	0,8	0,8	27	SULAWESI SELATAN	3,4	3,3
11	DKI JAKARTA	3,9	4,2	28	SULAWESI TENGGARA	1,0	0,8
12	JAWA BARAT	17,9	17,9	29	GORONTALO	0,4	0,4
13	JAWA TENGAH	13,5	13,3	30	SULAWESI BARAT	0,5	0,8
14	DI YOGYAKARTA	1,4	1,7	31	MALUKU	0,7	0,8
15	JAWA TIMUR	15,1	15,0	32	MALUKU UTARA	0,5	0,4
16	BANTEN	4,4	4,2	33	PAPUA BARAT	0,4	0,4
17	BALI	1,6	1,7	34	PAPUA	1,6	1,7



Validasi Sampel dan Populasi: Jenis Kelamin, Domisili, dan Karakter Wilayah

Kategori	Populasi (Sensus BPS 2020)	Sampel (2024)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	50,58	50,0
Perempuan	49,42	50,0
Domisili		
Pulau Jawa	56,1	56,3
Luar Pulau Jawa	43,9	43,8
Karakter Wilayah		
Perkotaan	56,7	56,3
Perdesaan	43,3	43,8



Profil responden: Agama, Suku Bangsa, Pendidikan Terakhir, dan Pengeluaran

Agama	Sampel
Islam	91,8
Kristen/Protestan	5,1
Katolik	1,9
Hindu	0,8
Budha	0,3
Konghucu	0,1
Suku Bangsa	Sampel
Jawa	41,3
Sunda	14,8
Melayu	5,0
Betawi	4,2
Batak	3,5
Minangkabau	3,1
Madura	3,0
Dayak	2,5
Bugis	2,3
Makassar	2,1

Suku Bangsa (lanjutan)	Sampel
Banjar	1,4
Papua	1,4
Aceh	1,2
Bali	1,1
Sasak	1,1
Ambon	0,8
Tionghoa	0,8
Timor	0,7
Lainnya	9,9

Pendidikan Terakhir	
Dasar (SD/SLTP/Sederajat)	58,3
Menengah (SLTP/Sederajat)	32,8
Tinggi (Akademi/Sarjana)	9,0
Pengeluaran Rata-Rata Keluarga/Bulan	
Di bawah Rp 1.000.000	13,5
Rp 1.000.000 s.d Rp 2.000.000	31,0
Rp 2.000.001 s.d Rp 3.000.000	26,2
Rp 3.000.001 s.d Rp 4.000.000	16,4
Rp 4.000.001 s.d Rp 5.000.000	5,8
Di atas Rp 5.000.000	6,9
TT/TJ	0,2



Struktur presentasi

1. Peta dan pengukuran gangguan informasi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan pada gangguan informasi dan dampaknya pada demokrasi dan persepsi integritas pemilu
3. Penggunaan AI generatif dan *deepfake video* dalam pemilu 2024
4. Potret aksesibilitas internet



Bagian Pertama

Peta dan Pengukuran Gangguan Informasi



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Safer
Internet
Lab
Led by CSIS
in partnership
with Google

Google



Pengukuran Kepercayaan pada Gangguan Informasi

Dalam survei ini, kami membacakan sejumlah informasi yang sudah terverifikasi sebagai informasi salah.

Responden diminta untuk menjawab apakah mereka **percaya atau tidak** terhadap **isi atau substansi dari informasi salah tersebut**.



Kepercayaan publik terhadap gangguan informasi (Survei setelah Pemilu 2024)*

Informasi salah pemilu

1. **Server KPU** berada di China.
2. **SIREKAP** hasil pemilu direkayasa hasilnya agar mirip dengan hasil *quick count*.
3. DKPP **membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran** karena tidak memenuhi syarat usia.
4. **Hasil pemilu di luar negeri** sudah diumumkan KPU sebelum pemilu 14 Februari 2024.
5. KPU menyusupkan **52 juta orang pemilih** untuk menguntungkan capres/cawapres tertentu.
6. **Ijazah Gibran Rakabuming Raka** hanya setara SMK.
7. Presiden Joko Widodo **bagi-bagi sembako gratis** di depan Istana dalam rangka pemilu 2024.
8. **Hasil pemilu 2024 sudah ditentukan KPU** sebelum pelaksanaan pemilu.

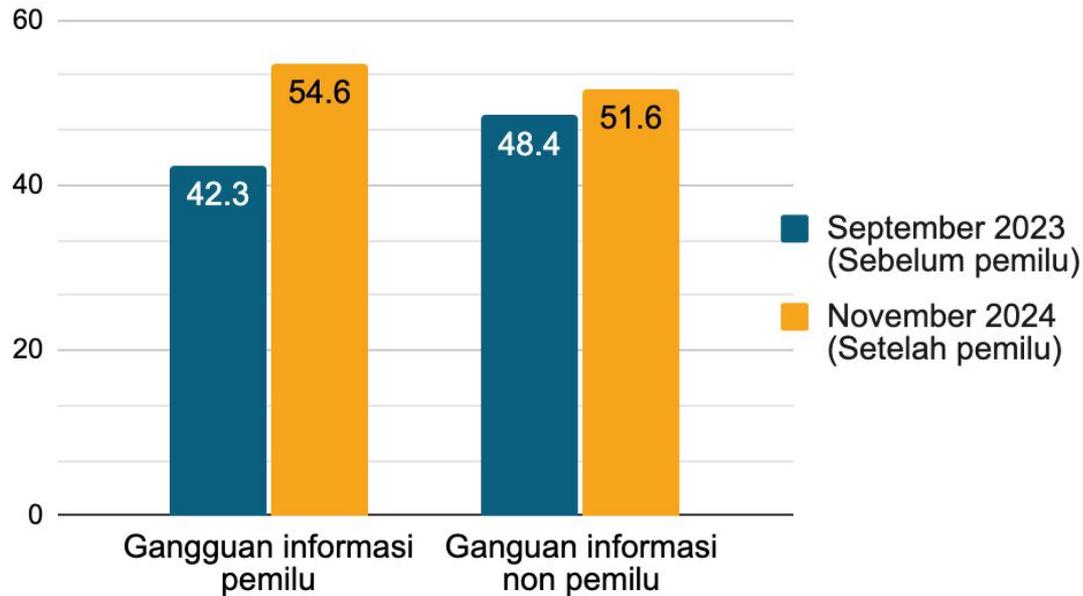
Informasi salah non-pemilu

1. Presiden Joko Widodo keturunan Tionghoa.
2. Dalam vaksin Covid-19 ditanam *chip* atau **alat pelacak** yang dapat memantau pergerakan orang yang divaksin.
3. Covid-19 adalah **senjata buatan** pembunuh massal.
4. Vaksinasi Covid-19 dapat membuat cacat anak-anak
5. Menteri Agama pernah mengganti **logo Halal** yang menggunakan huruf Arab menjadi gambar Wayang.
6. Pengesahan **Undang-Undang** Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditujukan untuk melegalkan seks bebas.
7. Saat ini sedang ada usaha membangkitkan kembali **PKI** (Partai Komunis Indonesia).
8. Bumi sesungguhnya **berbentuk datar**, bukan bulat seperti sering diajarkan di sekolah.

*Informasi salah yang diuji dalam survei ini adalah informasi-informasi yang sudah terverifikasi sebagai berita salah/palsu oleh koalisi CekFakta dan Kominfo. Pemilihan informasi salah mengacu pada jumlah penyebaran informasi tersebut dalam Pemilu. Sementara pada informasi salah non-pemilu pola penyebarannya terjadi secara berulang, atau mempunyai pola yang jelas.



Tingkat kepercayaan publik terhadap gangguan informasi*



Kepercayaan terhadap **gangguan informasi pemilu meningkat tajam** dibandingkan gangguan informasi non-pemilu.

Kenapa hal tersebut terjadi?

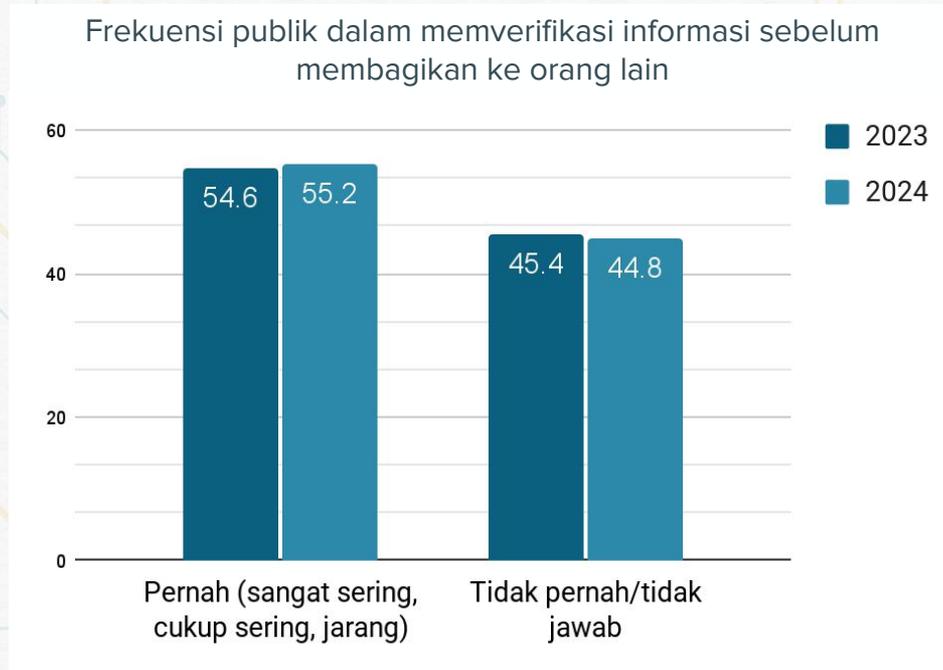
Alasan 1:

Volume gangguan informasi meningkat di masa pemilu. Upaya pengecekan fakta, meski sudah meningkat, masih kesulitan mengimbangi laju penyebaran mis/disinformasi.

*Tingkat kepercayaan dihitung berdasarkan kepercayaan terhadap [satu atau lebih](#) dari gangguan informasi yang ditanyakan. Pada gangguan informasi pemilu dan non-pemilu terdapat 8 aspek yang ditanyakan.



Mengapa kepercayaan pada gangguan informasi meningkat? (Alasan 2 - ketahanan informasi publik tidak meningkat)



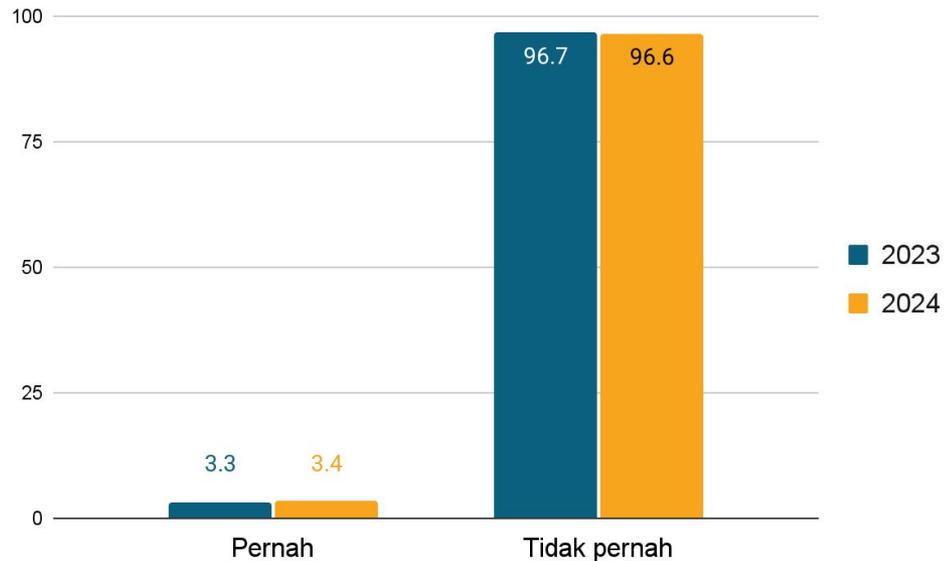
Jumlah peredaran gangguan informasi meningkat, tetapi ketahanan publik dalam **memverifikasi informasi salah** tidak meningkat (**stagnan**)



Mengapa kepercayaan pada gangguan informasi meningkat?

(Alasan 3 - partisipasi masyarakat dalam melaporkan mis/disinformasi rendah)

Frekuensi publik dalam melaporkan adanya berita bohong melalui kanal media sosial



Jumlah peredaran informasi hoaks meningkat, tetapi ketahanan publik untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan adanya berita bohong melalui kanal **pelaporan di media sosial sangat rendah**.



Analisis dan temuan utama (1)

- Tingkat kepercayaan publik terhadap gangguan informasi memang mengalami **peningkatan pada saat survei dilakukan setelah pemilu (November 2024)**, dibandingkan survei pada sebelum pemilu (September 2023).
- Meskipun kepercayaan terhadap gangguan informasi meningkat, namun **dampaknya tidak sebesar Pemilu 2019 lalu**. Dampak yang rendah itu terlihat dari tidak besarnya polarisasi di masyarakat, menurunnya penyebaran ujaran kebencian dalam pemilu, rendahnya penggunaan politik identitas, dan adanya penerimaan calon yang kalah terhadap hasil pemilu.
- Lemahnya dampak gangguan informasi bisa juga dipengaruhi oleh: adanya **konsensus di kalangan elit** untuk berkampanye sehat, **peran perusahaan platform teknologi** yang semakin terlibat dalam usaha-usaha menanggulangi gangguan informasi, serta peran dari media/lembaga pencari fakta.



Bagian Kedua

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan pada gangguan informasi dan dampaknya pada demokrasi dan persepsi integritas pemilu



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES

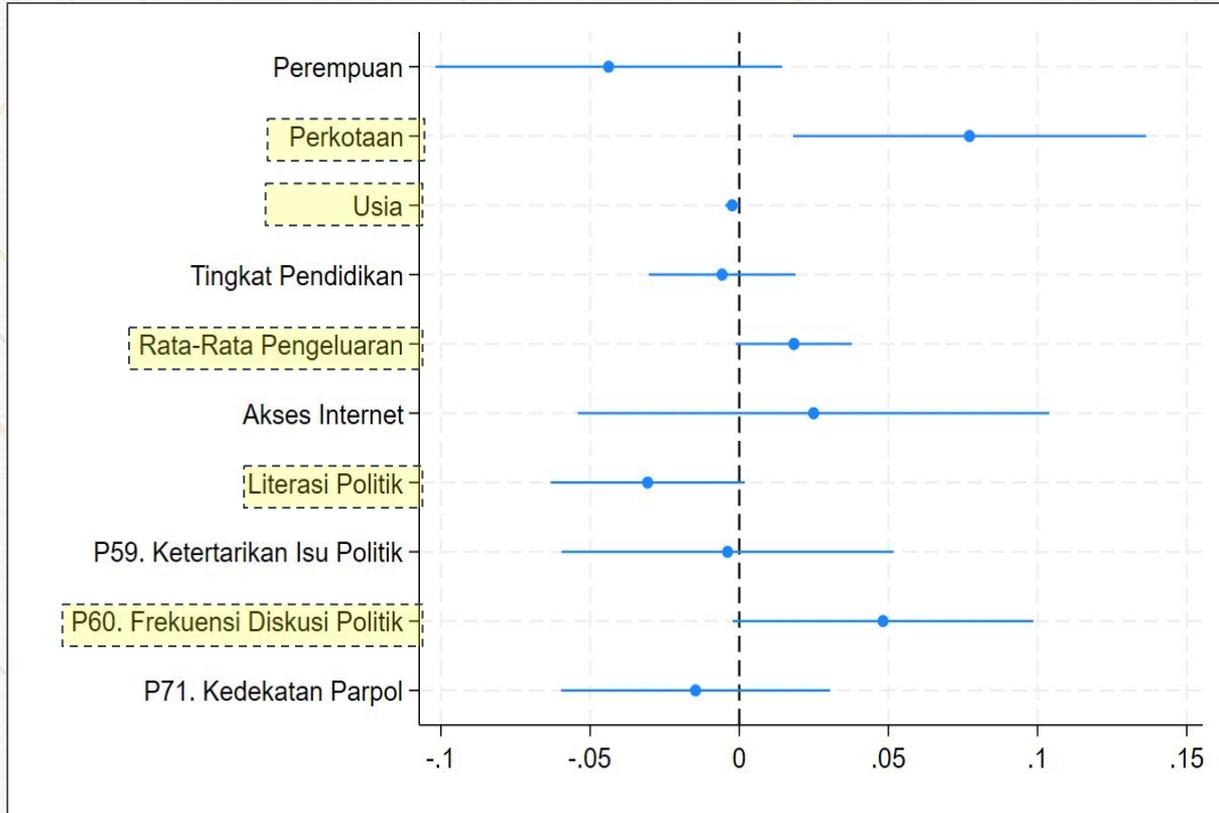


Safer
Internet
Lab
Led by CSIS
in partnership
with Google

Google



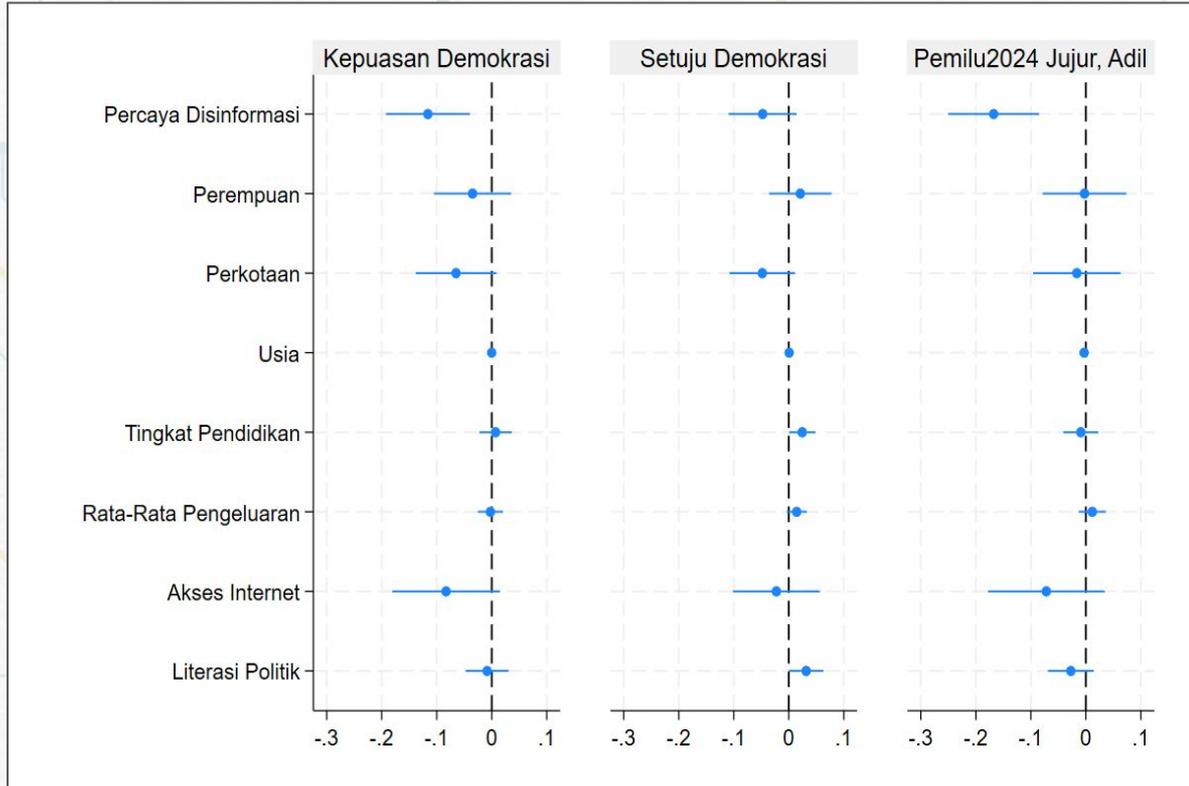
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan pada gangguan informasi



- Karakteristik **Perkotaan**, **Rata-Rata Pengeluaran**, dan **Frekuensi Diskusi Politik** signifikan berasosiasi **positif** dengan kepercayaan pada dis/misinformasi
- Karakteristik **Usia**, **Literasi Politik** signifikan berasosiasi **negatif** dengan kepercayaan pada dis/misinformasi
- Tinggal di **Perkotaan**, dan tingginya **sering berdiskusi politik** menjadi **koefisien yang paling besar** asosiasinya dengan kepercayaan disinformasi



Dampak kepercayaan pada pada gangguan informasi pada demokrasi dan integritas pemilu



Insights:

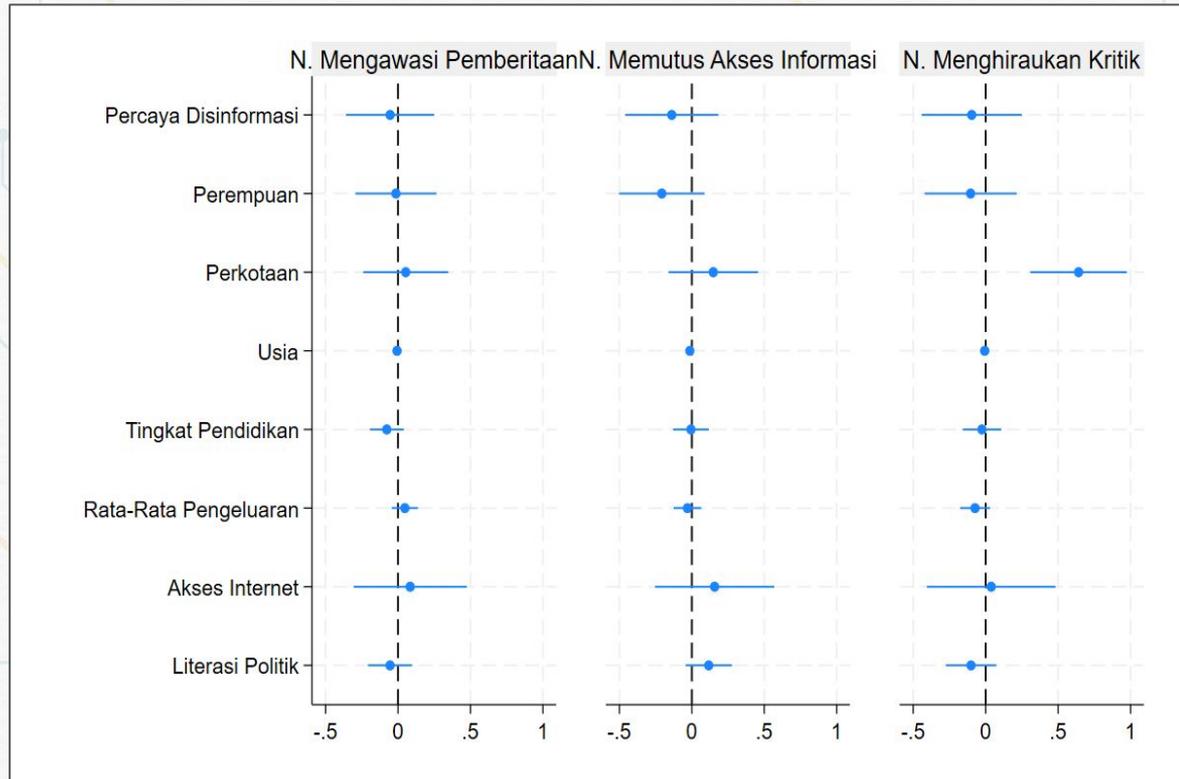
1. Penyebaran gangguan informasi dapat **menurunkan kepuasan dan dukungan** seseorang pada demokrasi serta mempengaruhi kepercayaan pada hasil pemilu.
2. Variabel **literasi politik mempengaruhi** dukungan seseorang pada demokrasi dan meningkatkan kepercayaan pada hasil pemilu.

Responden yang **percaya** dengan mis/disinformasi cenderung:

- a. **Tidak puas** dengan demokrasi
- b. **Tidak mendukung** sistem demokrasi
- c. Menilai pemilu 2024 **tidak jujur dan adil**



Hubungan antara kepercayaan pada gangguan informasi dan sikap publik terhadap peran negara



Tidak ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan pada gangguan informasi dengan peran negara mengelola informasi.



Analisis dan temuan utama (2)

- Kepuasan dan dukungan pada demokrasi salah satunya dipengaruhi oleh besar tinggi/rendah **penyebaran gangguan informasi**. Penyebaran gangguan informasi yang tinggi dapat **menurunkan kepuasan dan dukungan** seseorang pada demokrasi.
- **Literasi politik/informasi** dapat **mempengaruhi** tingkat kepuasan dan kepercayaan seseorang terhadap hasil pemilu.



Bagian Ketiga

Penggunaan AI Generatif dan *Deepfake** dalam Pemilu 2024



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Safer
Internet
Lab
Led by CSIS
in partnership
with Google

Google

*Dalam survei ini, responden ditanya pengalaman dan pendapatnya tentang penggunaan bahan kampanye yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Pada saat survei, pewawancara menunjukkan gambar dan video yang dibuat menggunakan AI generatif dan meminta pendapat/respons dari responden. *Deepfake* adalah rekayasa video menggunakan teknologi AI generatif.



Contoh penggunaan AI generatif dan video *deepfake* dalam kampanye



Foto dibuat menggunakan **teknologi kecerdasan buatan (AI)**

Foto digunakan oleh presiden dan wakil presiden terpilih selama **kampanye pilpres 2024**. Dalam pilpres 2024, Prabowo mendapatkan **58 persen suara**.



Contoh konten video yang dibuat menggunakan **teknologi kecerdasan buatan (AI)**

Video mantan Presiden Soeharto mengajak masyarakat untuk memilih Partai Golkar.

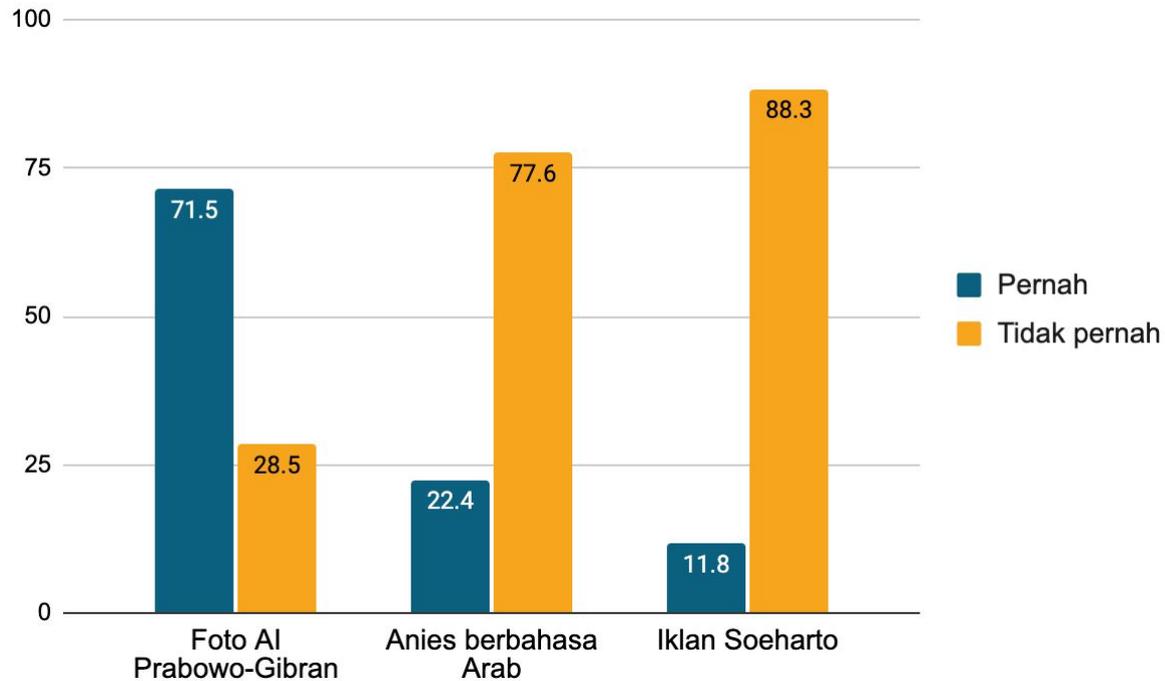


Contoh konten video (*deepfake*)

Video menggambarkan Anies Baswedan berbicara dalam bahasa Arab, meskipun sebenarnya dia tidak bisa berbicara dalam bahasa tersebut. Video ini adalah salah satu informasi salah yang dihasilkan melalui rekayasa digital.



Paparan Masyarakat terhadap Penggunaan AI Generatif dalam Kampanye (%)



Sebesar **71,5% responden** pernah melihat **foto Prabowo-Gibran** yang dibuat menggunakan AI.

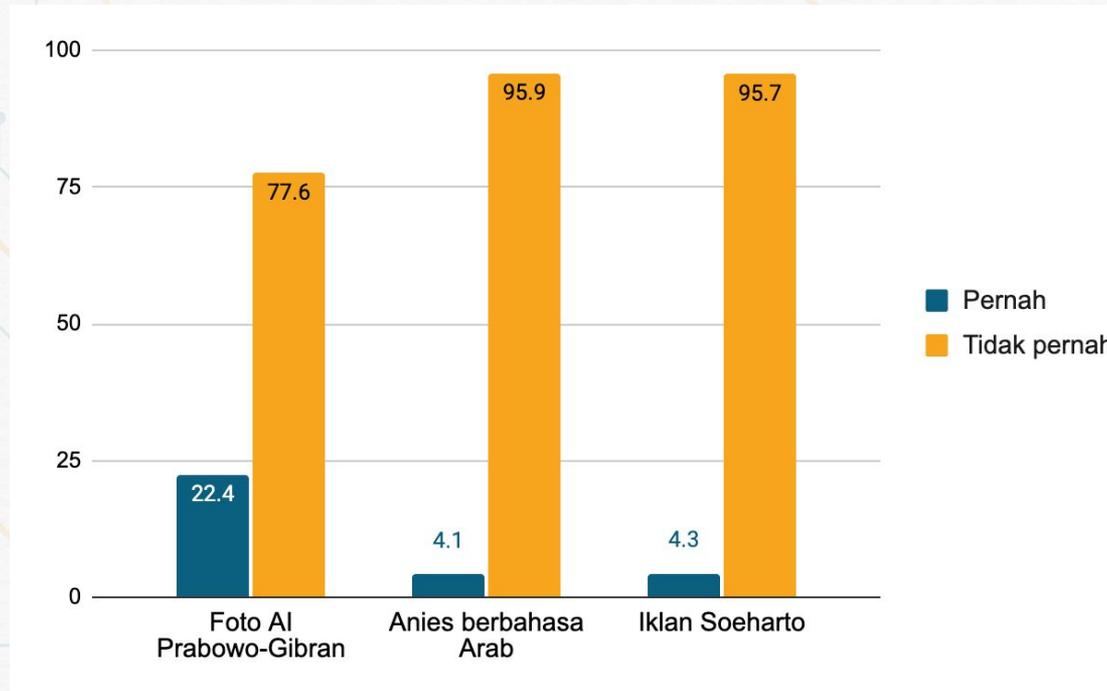
Penyebaran **deepfake video (video Anies berbahasa Arab)** juga cukup tinggi, di mana **22,4% responden** pernah melihatnya.

Sementara **11,8% responden** pernah melihat **iklan Soeharto** yang mempromosikan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.



Membagikan konten hasil teknologi AI

(Hanya ditanyakan kepada responden yang pernah melihat konten tersebut)



Sebanyak **22,4% responden** dari yang pernah melihat **foto Prabowo-Gibran**, mengaku pernah membagikan foto tersebut kepada orang lain.

Terdapat **4,1% responden** yang pernah melihat **video Anies berbahasa Arab**, mengaku pernah membagikannya.

Sementara itu, **4,3% responden** dari yang pernah melihat **iklan Soeharto**, mengaku pernah membagikannya.



Kepercayaan pada konten hasil teknologi AI Contoh Iklan Presiden Soeharto

Keterangan	Baseline	Benar	Tidak benar	Tidak tahu	Total
Video Iklan Soeharto					
Pernah melihat	11,8	33,3%	42,6%	24,1%	100,0%
Tidak pernah melihat	88,3	19,2%	55,4%	25,4%	100,0%

Q: Menurut Anda apakah pernyataan dalam video tersebut benar disampaikan oleh Presiden Soeharto?

Kerentanan publik dalam membedakan konten asli dan rekaan cukup tinggi.

Sepertiga dari responden yang pernah melihat iklan Presiden Soeharto dalam Pemilu 2024 lalu, **percaya bahwa pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Soeharto**, padahal presiden Soeharto sudah meninggal.

Seperempat dari responden pun **menjawab tidak tahu** apakah pernyataan tersebut benar disampaikan oleh presiden Soeharto.



Analisis dan temuan utama (3)

- Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) **diprediksi akan semakin banyak** digunakan.
- Saat ini memang sudah ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang melarang penggunaan AI dalam kampanye. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, regulasi **cukup sulit** diimplementasikan.
- Dari sisi masyarakat, **masih kesulitan untuk membedakan** antara informasi yang disampaikan secara langsung dengan informasi yang dikreasikan menggunakan kecerdasan buatan.
- Aspek yang mengkhawatirkan adalah **penggunaan *deepfake* video dalam kampanye** yang dapat menirukan suara dan menyerupai gambar/foto/video seseorang.





Bagian Keempat

Potret Aksesibilitas Internet di Indonesia



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



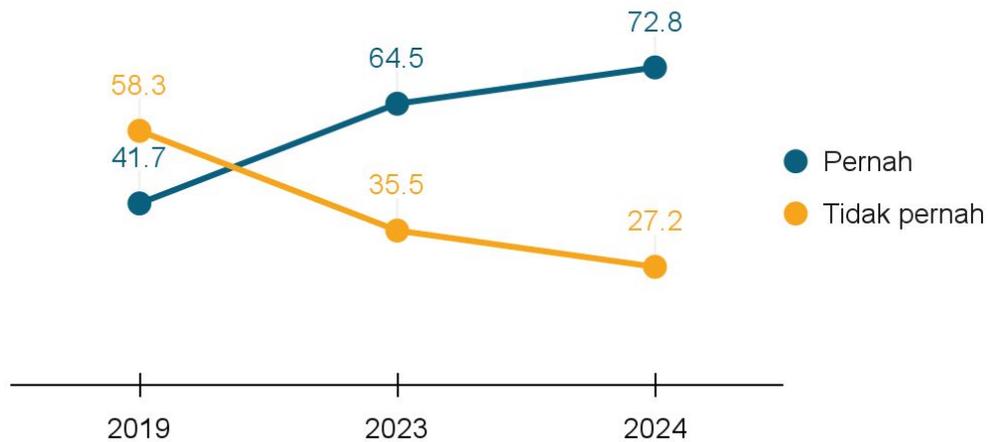
Safer
Internet
Lab
Led by CSIS
in partnership
with Google

Google



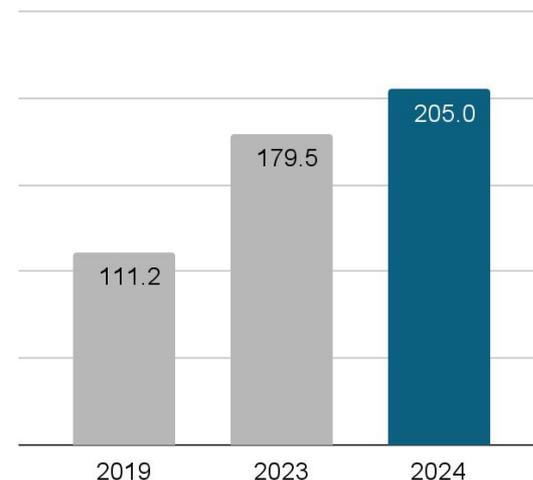
Penggunaan Internet (%)

Apakah Ibu/Bapak/Saudara pernah **mengakses internet** (seperti melihat media sosial atau mencari berita di internet melalui telepon pintar (HP) atau komputer/laptop dalam **1 (satu) minggu terakhir**?



Proporsi masyarakat yang mengakses internet **meningkat** dari **41,7%** (2019) ke **64,5%** (2023) dan **72,8%** (2024).

Jumlah pengguna internet berdasarkan jumlah populasi di Indonesia (dalam juta)

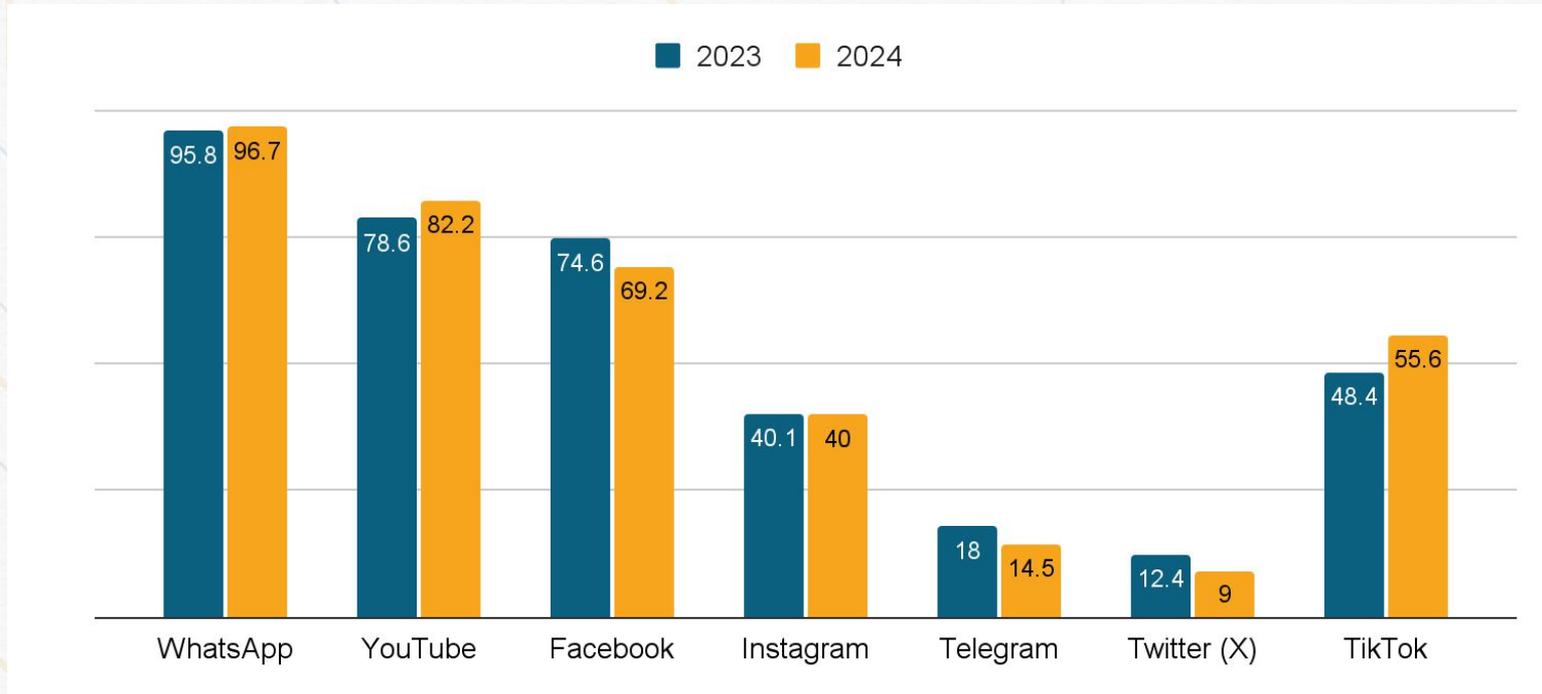


Sekitar 205 juta orang atau sebesar 72,8% masyarakat Indonesia mengakses internet pada tahun 2024.



Media sosial yang paling sering digunakan dalam satu minggu terakhir (%)

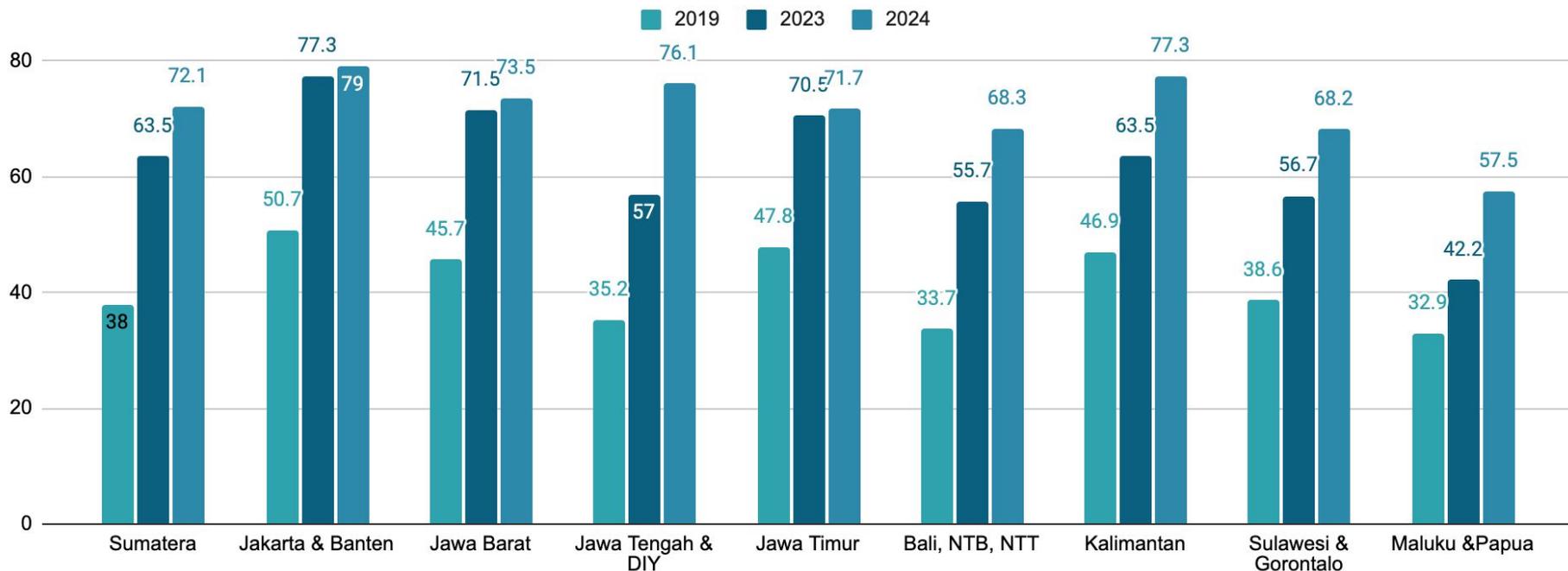
(hanya ditanyakan kepada responden yang mengakses internet)



Akses masyarakat terhadap **TikTok** mengalami peningkatan yang tertinggi dibandingkan platform media sosial lainnya. Sementara itu, **WhatsApp** masih menjadi platform yang **paling banyak digunakan**.



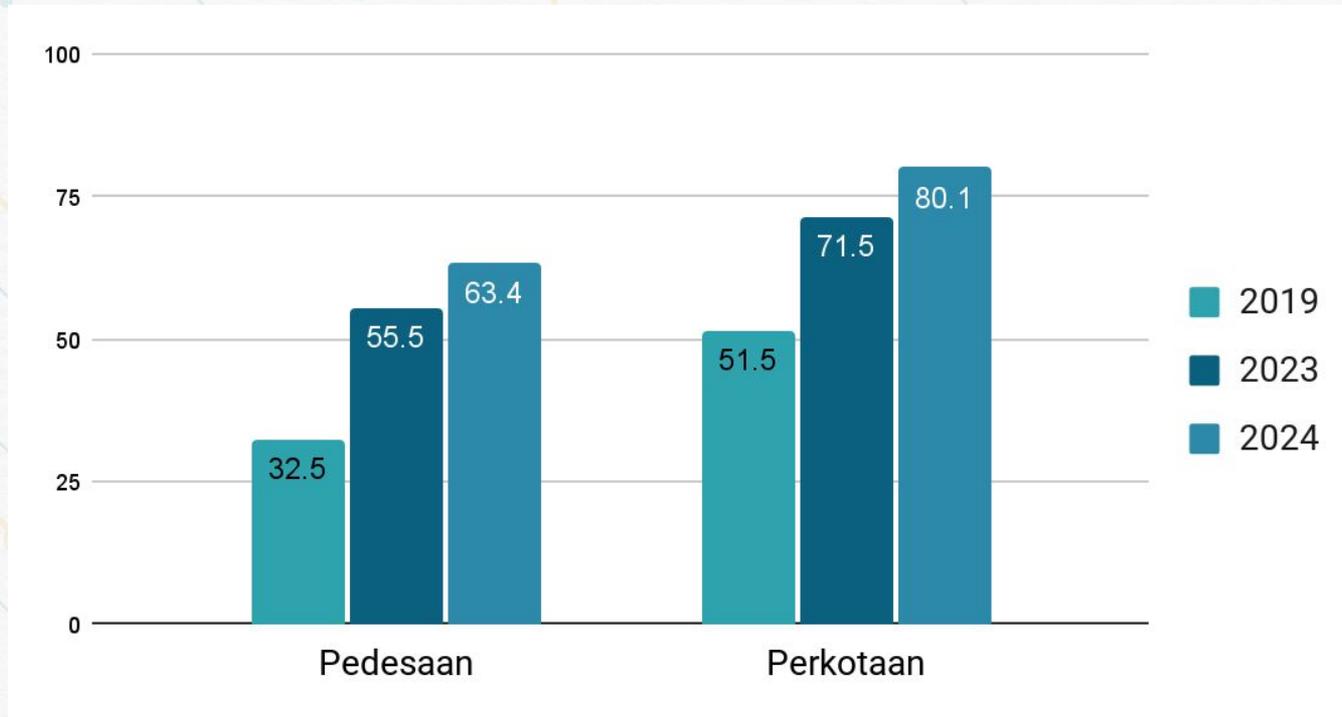
Penggunaan Internet Berdasarkan Area (%)



Tingkat penggunaan internet **meningkat** di semua wilayah di Indonesia. Daerah **Jawa Tengah dan DIY** mengalami peningkatan **paling signifikan** dari tahun 2023 ke 2024.



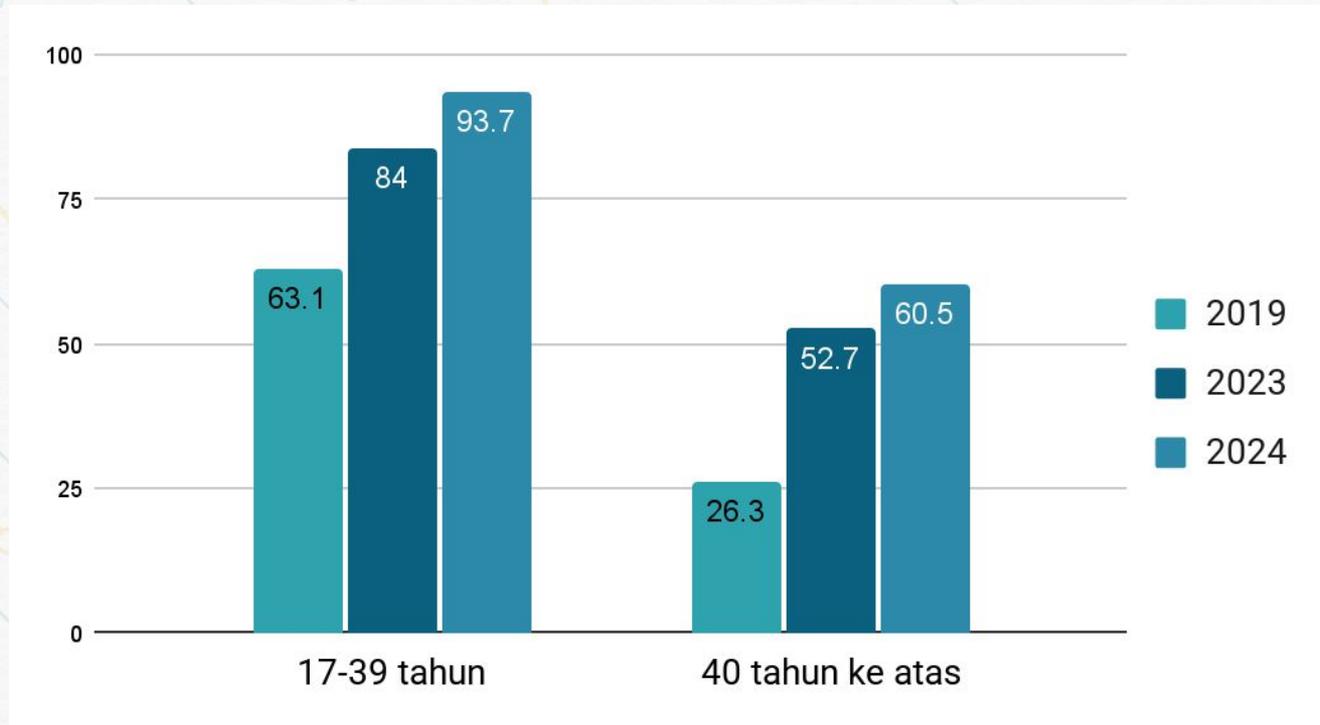
Penggunaan Internet Berdasarkan Karakter Wilayah (%)



Tingkat penggunaan internet **meningkat** baik di pedesaan maupun di perkotaan. Penggunaan internet di **perkotaan** jauh **lebih tinggi** dibandingkan di pedesaan.



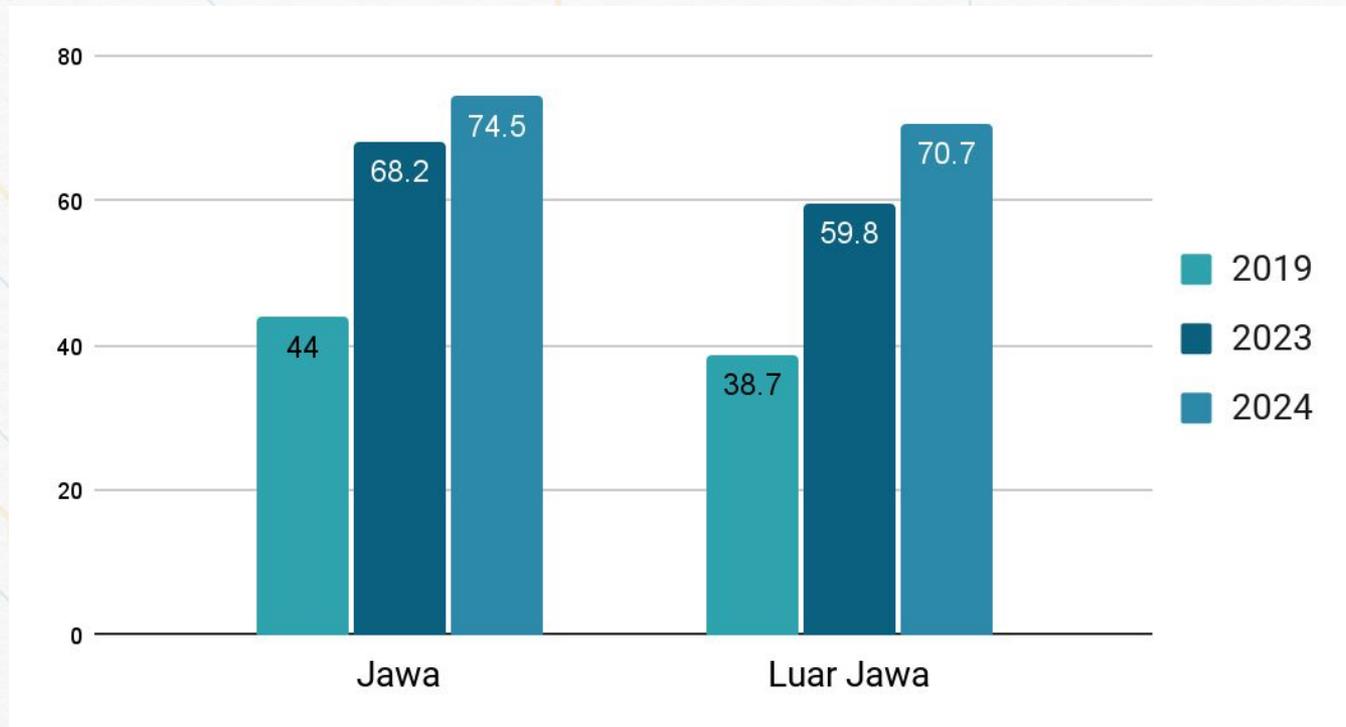
Penggunaan internet berdasarkan kelompok usia (%)



Tingkat penggunaan internet **meningkat** baik di kelompok umur 17-39 tahun maupun 40 tahun ke atas. Penggunaan internet **lebih tinggi** pada kelompok umur **di bawah 40 tahun**.



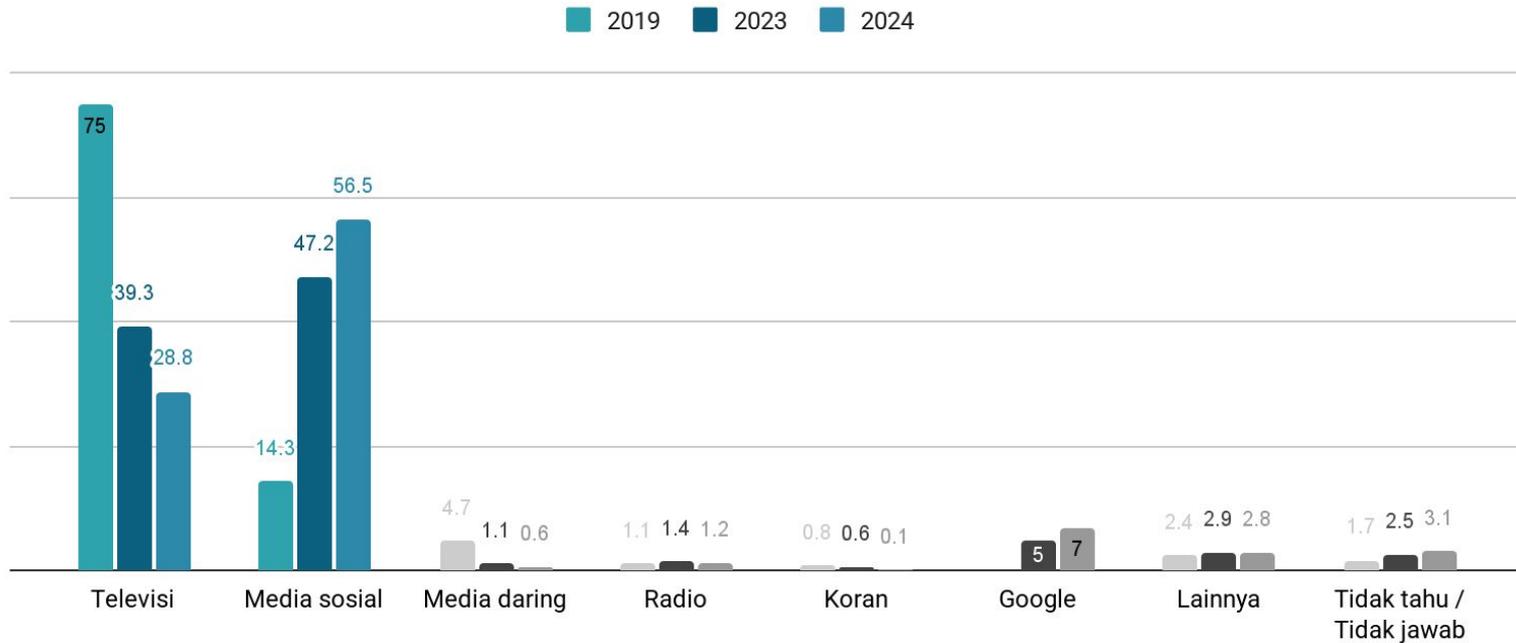
Penggunaan internet berdasarkan pulau (%)



Tingkat penggunaan internet **meningkat** baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Meskipun penggunaan internet di **Pulau Jawa lebih tinggi**, perbedaannya dengan luar Pulau Jawa **tidak berbeda cukup jauh**.



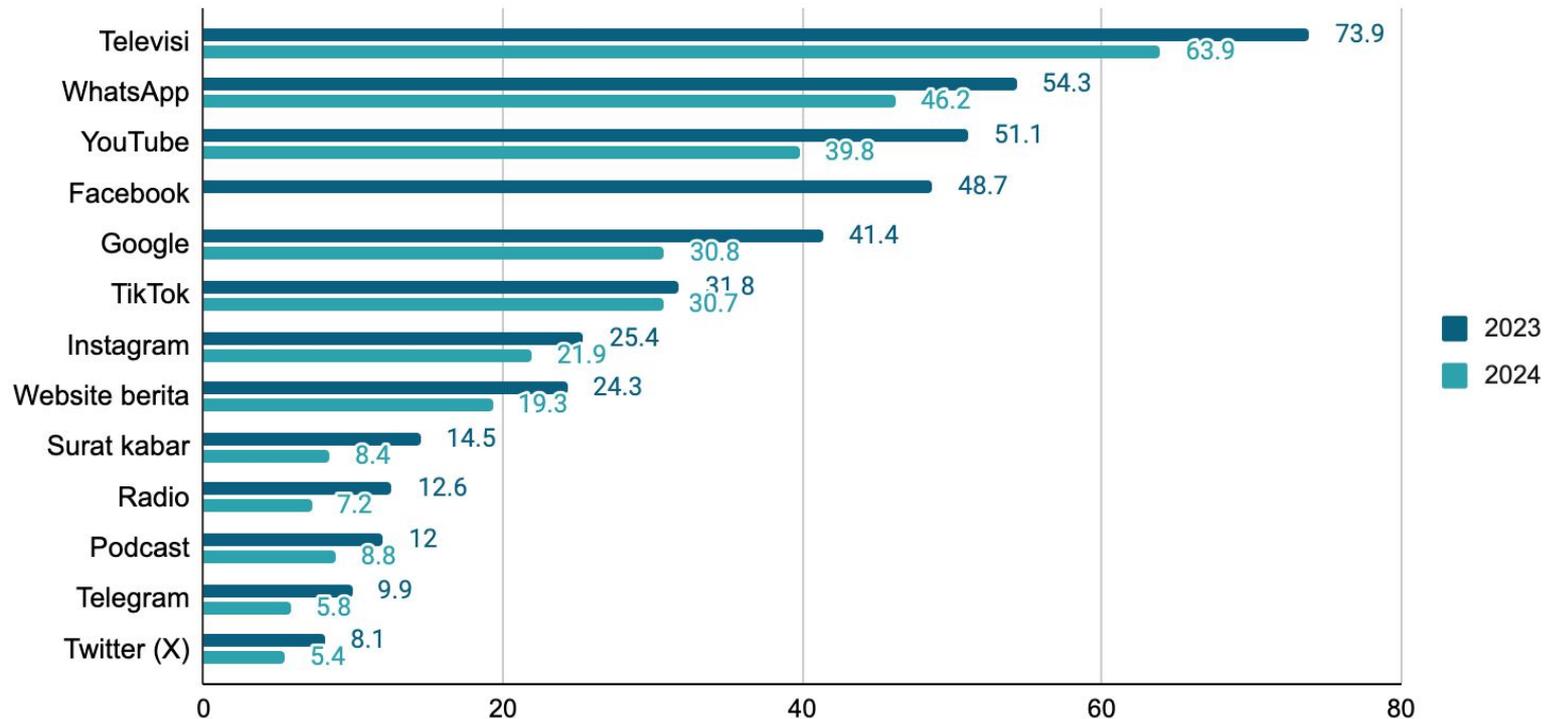
Sumber utama dalam mencari informasi (%)



Televisi tidak lagi menjadi sumber utama dalam mencari informasi. Persentasenya **menurun signifikan** dari 75% (2019) ke 39,3% (2023) lalu **28,8% (2024)**. Sebaliknya, **media sosial** mengalami **peningkatan** hingga menjadi sumber utama dalam mencari informasi di tahun 2024 dengan persentase **56,5%**.



Medium untuk mendapatkan informasi politik (%)



Meskipun mengalami penurunan, **televisi** masih menjadi **medium utama** untuk mendapatkan informasi politik.



Analisis dan temuan utama (4)

- Peningkatan akses masyarakat terhadap internet mengalami **peningkatan tajam** dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama, proporsi masyarakat yang mengakses aplikasi pesan, video, dan media sosial terbilang **tinggi**.
- *Digital divide antar-wilayah* dan berdasarkan **pulau** (Jawa-luar Jawa), **mulai mengecil** dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dari sisi **usia** (muda-tua) dan **karakter wilayah** (desa-kota) masih terjadi **gap yang cukup tinggi**.
- **Televisi** masih menjadi **rujukan utama** masyarakat untuk mengetahui informasi politik. Pada saat yang sama, posisi televisi sebagai sumber informasi utama masyarakat mengalami **penurunan sangat tajam**. Saat ini **media sosial** menjadi rujukan utama yang digunakan masyarakat untuk mencari informasi.



Catatan Penutup dan Rekomendasi

- Kerjasama multipihak untuk melakukan proses ***prebunking dan debunking*** pada isu-isu pemilu di antara penyelenggara (KPU/Bawaslu/DKPP), peserta pemilu, masyarakat, dan masyarakat sipil, perlu **mendapatkan perhatian** dan perlu **dilanjutkan pasca pemilu**.
- Dalam konteks pemilu, memastikan **pemilu yang berintegritas** (sistem penghitungan suara yang dapat diakses publik, profesionalitas penyelenggara, perlindungan data pemilih) adalah penting untuk **mengurangi menyebarnya informasi salah** tentang pemilu.





Safer Internet Lab



saferinternetlab.org